



Sekolah Tak Boleh Lagi Tahan Ijazah

Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan dana sebesar Rp 1,5 miliar.

Iqbal Muhtarom
iqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan tahun ini tak ada lagi sekolah yang menahan ijazah siswa yang masih menunggu iuran sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edi Heri Susana mengatakan pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran khusus bagi para siswa yang kesulitan membayar iuran sekolah. "Sudah ada dana lewat APBD Dinas Pendidikan," katanya kepada *Tempo*.

Menurut Edi, alokasi anggaran yang disediakan pemerintah kota untuk membantu tunggakan para siswa tersebut sebesar Rp 1,5 miliar. Dana tersebut, kata Edi, masuk ke pos anggaran program Jaminan Pendidikan Daerah Kota (JPD) Yogyakarta, yang totalnya mencapai Rp 36 miliar.

Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pencairan anggaran agar dana tersebut benar-benar digunakan oleh siswa atau wali murid yang membutuhkan. Syarat yang paling pokok, kata Edi, siswa menunjukkan surat tagihan uang pendidikan dari pihak sekolah berikut jumlah tunggaknya. "Surat itu kemudian diajukan ke Unit Pelaksana Teknis JPD," ujar Edi.

Bersama surat tagihan tersebut, siswa atau wali murid harus mendapatkan verifikasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Berdasarkan verifikasi dari Dinas Sosial itulah, Unit Pelaksana Teknis JPD akan menentukan berapa jumlah bantuan yang akan diberikan bagi siswa yang kesulitan menebus ijazahnya.

Menurut rencana, ijazah siswa, baik SD, SMP, maupun SMA/SMK, akan dibagikan sejak awal hingga akhir Juni mendatang.

Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Bahron Rosyid mengatakan belum tahu apakah tahun ini akan ada talangan untuk siswa yang kesulitan menebus ijazahnya karena masih menunggu iuran sekolah. Berbeda dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah Gunungkidul mengandalkan bantuan dari pemerintah DIY. "Tahun lalu seperti itu, tapi sampai sekarang kami belum tahu masih ada tidak anggaran itu," ujarnya.

Meskipun tidak punya anggaran khusus bagi para siswa yang kesulitan menebus ijazah, Dinas Pendidikan Gunungkidul meminta seluruh sekolah tidak menahan ijazah siswanya. "Kami juga minta orang tua murid agar sebisa mungkin melunasi tunggakan karena itu bentuk tanggung jawab mereka," kata Bahron.

Sekretaris Forum Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarung Lidi) Yogyakarta, Yuliani, mengatakan pemerintah sudah saatnya bersikap tegas kepada pihak sekolah negeri maupun swasta yang masih menahan ijazah siswa. "Hentikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan tinjau ulang perizinannya," kata Yuliani. Yuliani menyayangkan sampai saat ini masih ada sekolah yang menahan ijazah siswa yang menunggu iuran. Kejadian ini, kata dia, umumnya banyak dilakukan oleh sekolah swasta. "Padahal sekolah swasta juga dapat dana BOS," ujarnya.

Selama ini, menurut dia, para siswa yang kesulitan menebus ijazah umumnya berasal dari keluarga miskin. Berdasarkan data Sarang Lidi, hingga saat ini mereka masih menyelesaikan pengurusan 20 ijazah yang ditahan sekolah dari beberapa wilayah DIY, seperti Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman. "Ada yang ditahan sejak 2010," ujarnya.

● PRIBADI WICAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005